

EKSISTENSI KERAJAAN HITU DI TENGAH ARUS PERUBAHAN DARI TAHUN 1600-1945**THE EXISTENCE OF THE HITU KINGDOM AMID THE WAVES OF CHANGE 1600-1945****Linda Wally¹, Meri Erlina², Riani Suminar³**¹Universitas Persatuan Islam: lindawally851@gmail.com²Universitas Persatuan Islam: merierlina7@gmail.com³Universitas Persatuan Islam: rianisuminar7@gmail.com**ARTICLE INFO**Received: 11th January 2025Revised: 28th February 2025Accepted: 5th March 2025Published: 30th March 2025

This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Print ISSN:

Online ISSN:

ABSTRAK

Kajian ini menganalisis eksistensi Kerajaan Hitu di jazirah Leihitu, Maluku, sebagai entitas politik maritim yang pembentukannya tidak terpisahkan dari dinamika globalisasi arkaik yang menghubungkan kepulauan Maluku dengan jaringan perdagangan lintas-benua sejak abad ke-13. Kajian-kajian yang ada cenderung membaca Hitu secara parsial baik sebagai objek kolonialisme semata maupun sebagai fenomena lokal yang terlepas dari konteks sistem dunia yang lebih luas. Dengan menggunakan pendekatan historis-analitis yang memadukan sejarah maritim, sosiologi kekuasaan, dan teori globalisasi, studi ini menelaah pembentukan kekuasaan berbasis jaringan, Islamisasi sebagai rekonfigurasi legitimasi, ekonomi rempah dalam tatanan multilateral, sistem soa sebagai oligarki federatif, strategi negosiasi di bawah tekanan kolonial VOC, serta warisan Hitu dalam arus globalisasi kontemporer. Studi ini menemukan bahwa Kerajaan Hitu beroperasi sebagai aktor aktif dalam globalisasi arkaik jauh sebelum hegemoni Eropa, dan bahwa ketahanannya bertumpu pada persistensi institusi-institusi informal sistem soa dan memori kolektif yang melampaui kehancuran struktur politiknya. Kajian ini menegaskan urgensi dekolonisasi historiografi Indonesia sekaligus membuka relevansi warisan Hitu bagi diskursus heritage dan pendidikan sejarah kontemporer.

KATA KUNCI

Kerajaan Hitu, globalisasi, perdagangan rempah, sistem soa, kolonialisme VOC, historiografi maritim Indonesia

ABSTRACT

This study examines the Kingdom of Hitu in the Leihitu Peninsula, Maluku, as a maritime polity whose formation was inseparable from the dynamics of archaic globalization connecting the Maluku archipelago to transcontinental trade networks since the thirteenth century. Existing scholarship tends to read Hitu partially either as a mere object of colonialism or as a local phenomenon disconnected from broader world-system dynamics. Employing a historical-analytical approach that integrates maritime history, political sociology, and globalization theory, this study examines network-based polity formation, Islamization as legitimacy reconfiguration, the spice economy within a multilateral trading order, the soa system as federative oligarchy, negotiation strategies under VOC colonial pressure, and Hitu's legacy within contemporary globalization. The study finds that the Kingdom of Hitu functioned as an active agent in archaic globalization long preceding European hegemony, and that its resilience rested on the persistence of informal institutions particularly the soa system and collective memory which survived the dismantling of its formal political structure. This study affirms the necessity of decolonizing Indonesian historiography while opening Hitu's heritage as a resource for contemporary discourses on cultural heritage and historical education.

KEYWORDS

Kingdom of Hitu, globalization, spice trade, soa system, VOC colonialism, Indonesian maritime historiography

PENDAHULUAN

Kerajaan Hitu merupakan salah satu entitas politik lokal di wilayah Maluku yang memiliki strategi dalam jalur perdagangan dan interaksi budaya di wilayah Indonesia Timur. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis jazirah Leihitu yang sejak masa pramodern telah menjadi titik perlintasan penting dalam jaringan perdagangan regional dan internasional. Interaksi antara berbagai kelompok etnis dan budaya di wilayah ini membentuk karakter masyarakat yang heterogen, yang tercermin dalam sistem sosial, bahasa, dan praktik budaya yang berkembang (Collins, 1993; Ellen, 1983). Posisi geografis tersebut menjadikan Hitu tidak hanya sebagai wilayah maritim, tetapi juga sebagai ruang pertemuan antara berbagai pengaruh eksternal yang membentuk dinamika sosial dan politik lokal.

Proses Islamisasi di wilayah Maluku, khususnya di Hitu, menampilkan keterkaitan erat antara aktivitas perdagangan dan transformasi sosial keagamaan. Masuknya Islam melalui jalur perdagangan sejak abad ke-12 dan berkembangnya kekuasaan bercorak Islam pada abad ke-14 menunjukkan bahwa perubahan keagamaan tidak terjadi secara terpisah dari dinamika ekonomi dan politik (Leirissa, 1999). Pembentukan Kerajaan Hitu yang dipimpin oleh struktur kepemimpinan lokal seperti Empat Perdana menunjukkan adanya integrasi antara otoritas politik dan legitimasi keagamaan dalam membangun kekuasaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerajaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang mengorganisasi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk agama, ekonomi, dan budaya (Hadarabah Rajab, 2007).

Perkembangan Kerajaan Hitu tidak dapat dilepaskan dari pengasingannya sebagai perdagangan rempah-rempah yang terhubung dengan jaringan perdagangan global. Komoditas seperti cengkeh dan pala menjadikan wilayah ini memiliki nilai ekonomi tinggi, sekaligus menarik perhatian berbagai kekuatan eksternal, termasuk pedagang dari Asia dan bangsa Eropa. Interaksi ekonomi tersebut tidak hanya menghasilkan pertukaran barang, tetapi juga mempercepat proses pertukaran budaya, teknologi, dan ideologi yang menyuburkan dinamika masyarakat lokal (Andaya, 1993; Reid, 1993). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kerajaan Hitu berkembang dalam konteks global yang dinamis, di mana kekuatan lokal dan eksternal saling berinteraksi dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi.

Dinamika tersebut tidak selalu menimbulkan stabilitas, melainkan juga menimbulkan ketegangan yang berkontribusi terhadap perubahan dalam struktur kekuasaan. Sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik dengan keberadaan *soa* sebagai unit sosial-politik menunjukkan adanya distribusi kekuasaan yang tidak mudah, yang pada satu sisi memperkuat otonomi lokal, tetapi pada sisi lain berpotensi menimbulkan konflik internal (Cooley, 1962; Djajadiningrat, 1913). Fragmentasi kekuasaan yang dipicu oleh persaingan antar elit lokal serta tekanan dari kekuatan eksternal, seperti intervensi kolonial, mengemukakan bahwa keinginan kerajaan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga oleh dinamika geopolitik yang lebih luas (Ricklefs, 2008).

Meskipun Kerajaan Hitu memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia Timur, kajian mengenai kerajaan ini masih relatif terbatas dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan besar di wilayah barat Indonesia. Sebagian besar penelitian sejarah cenderung fokus pada narasi besar yang menempatkan kerajaan besar sebagai pusat analisis, sehingga mengabaikan dinamika lokal

yang justru memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas sejarah Indonesia (Reid, 1993). Pendekatan yang ada juga sering kali bersifat deskriptif dan belum secara mendalam mengkaji bagaimana kerajaan-kerajaan kecil seperti Hitu mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung dalam jangka panjang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menafsirkan Kerajaan Hitu sebagai entitas lokal yang mampu bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan arus dari tahun 1600 hingga 1945 melalui pendekatan historis-kritis. Kajian ini tidak hanya fokus pada keberadaan kerajaan sebagai struktur politik, tetapi juga menempatkannya sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal, termasuk kolonialisme dan perubahan struktur ekonomi global. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana Kerajaan Hitu mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi perubahan zaman, bagaimana dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi keinginan kerajaan, serta strategi apa yang digunakan untuk beradaptasi terhadap tekanan kolonial dan transformasi sosial yang terjadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-kritis untuk menganalisis eksistensi Kerajaan Hitu dalam rentang waktu 1600–1945. Pendekatan historis dipilih karena memungkinkan peneliti merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis sekaligus menafsirkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya (Kuntowijoyo, 2013). Fokus penelitian tidak hanya pada kronologi peristiwa, tetapi juga pada bagaimana Kerajaan Hitu mempertahankan eksistensinya melalui adaptasi terhadap perubahan internal dan tekanan eksternal, termasuk intervensi kolonial.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik heuristik dengan menghimpun berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer meliputi naskah lokal seperti Hikayat Tanah Hitu, tradisi lisan yang masih hidup di dalam, serta arsip masyarakat dan catatan kolonial yang mencatat interaksi antara Kerajaan Hitu dan kekuatan asing. Tradisi lisan digunakan sebagai bagian dari memori kolektif masyarakat yang merefleksikan konstruksi identitas dan legitimasi kekuasaan lokal, meskipun tetap dikaji secara kritis untuk menghindari bias mitos (Manusama, 1977). Sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, serta laporan penelitian yang membahas sejarah Maluku, perdagangan rempah, dan kolonialisme di Indonesia Timur.

Validitas data dijaga melalui proses verifikasi dengan menerapkan kritik sumber secara eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai keaslian dan kredibilitas sumber sejarah, terutama dalam membedakan antara fakta sejarah dan narasi yang bersifat legenda. Kritik internal digunakan untuk menyebarkan isi sumber, termasuk bias penulis, kepentingan politik yang melatarbelakanginya, serta konteks sosial ketika sumber tersebut diproduksi. Pendekatan ini penting mengingat banyaknya sumber sejarah tentang Hitu yang berasal dari perspektif kolonial maupun tradisi lisan yang memiliki keterbatasan metodologis. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola utama dalam dinamika Kerajaan Hitu, seperti fase pembentukan, penguatan kekuasaan, konflik internal, serta

interaksi dengan kekuatan eksternal. Proses analisis tidak hanya mengelompokkan data berdasarkan tema, tetapi juga memahami hubungan antara struktur kekuasaan lokal, sistem adat, dan tekanan kolonial dalam membentuk kerajaan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menjelaskan tidak hanya “apa yang terjadi”, tetapi juga “mengapa dan bagaimana” Kerajaan Hitu mampu bertahan dalam arus perubahan sejarah.

Tahap akhir penelitian adalah historiografi, yaitu penyusunan narasi sejarah yang bersifat analitis dan argumentatif dengan mengintegrasikan temuan empiris dan kerangka konseptual. Dalam tahap ini, Kerajaan Hitu diposisikan sebagai entitas lokal yang tidak hanya mengalami perubahan, tetapi juga secara aktif beradaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Penulisan historiografi dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber, sehingga hasil penelitian tidak hanya mereproduksi narasi lama, tetapi juga memberikan interpretasi baru terhadap keberadaan Kerajaan Hitu dalam konteks sejarah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Geografis dan Pembentukan Kekuasaan Lokal di Jazirah Leihitu

Kepulauan Maluku menempati posisi yang secara geopolitik dan ekologis bersifat singular dalam tatanan perdagangan dunia pra-modern. Sebagai satu-satunya wilayah penghasil cengkeh dan pala dalam skala yang dapat diperdagangkan secara komersial, Maluku menjadi titik gravitasi bagi jaringan niaga yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan kemudian Eropa dalam satu sistem pertukaran komoditas yang berlangsung selama berabad-abad. Reid (1993, hlm. 11–13) menegaskan bahwa kelangkaan geografis rempah-rempah ini menciptakan apa yang ia sebut sebagai “monopoly of nature”, suatu kondisi di mana keunggulan komparatif sepenuhnya bersifat alami dan tidak dapat direplikasi oleh kawasan lain, sehingga menjadikan kontrol atas wilayah produksi rempah sebagai tujuan strategis yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan niaga dan militer lintas zaman. Dalam konteks ini, pembentukan entitas-politik lokal di Maluku tidak dapat dipahami terlepas dari dinamika struktural yang ditentukan oleh nilai komoditas tersebut.

Posisi jazirah Leihitu secara spesifik dalam kerangka geografis tersebut memberikan keuntungan berlapis bagi komunitas yang bermukim di sana. Leihitu bukan sekadar wilayah produksi, melainkan juga kawasan yang secara hidrologis menghadap langsung ke Selat Hitu sebuah koridor pelayaran yang menghubungkan bagian barat dan timur Pulau Ambon dengan jalur-jalur utama menuju Banda, Ternate, dan kepulauan penghasil rempah lainnya. Andaya (1993, hlm. 47) mencatat bahwa komunitas-komunitas yang mendiami pesisir utara Ambon, termasuk Hitu, membangun identitas maritim yang distingtif berdasarkan kemampuan navigasi, pengelolaan perahu, dan negosiasi dengan pedagang asing yang secara rutin singgah di perairan mereka. Identitas ini membentuk basis sosial bagi pembentukan kekuasaan yang tidak bersandar pada kepemilikan tanah pertanian sebagaimana lazim pada kerajaan-kerajaan agraris di Jawa melainkan pada kendali atas akses terhadap jaringan pertukaran.

Pembentukan Kerajaan Hitu sebagai entitas politik yang terorganisasi perlu dipahami melalui lensa teori “networked polity” yang dikembangkan oleh Hall (2011, hlm. 204–207).

Teori ini memandang kerajaan-kerajaan maritim Asia Tenggara bukan sebagai negara dalam pengertian Weberian yang mengandalkan monopoli kekerasan atas teritori tertentu, melainkan sebagai nodal dalam jaringan aliansi, pertukaran, dan negosiasi yang otoritasnya diukur dari kapasitasnya dalam mempertahankan dan memperluas relasi tersebut. Kerajaan Hitu dengan demikian bukanlah kerajaan yang terbentuk melalui penaklukan militer atas wilayah sekitarnya, tetapi melalui kristalisasi bertahap dari jaringan sosial yang sudah ada kluster-kluster kerabat, komunitas pedagang, dan pemimpin ritual ke dalam sebuah hierarki politik yang semakin formal. Proses ini berlangsung secara inkremental dan tidak linier, yang menjelaskan mengapa Kerajaan Hitu sejak awal memiliki karakter federatif yang khas.

Perbandingan dengan model kerajaan agraris di Jawa khususnya Mataram mempertegas keunikan konfigurasi kekuasaan Hitu. Kerajaan-kerajaan agraris beroperasi dalam logika “theatre state” yang dianalisis Geertz (1980, hlm. 13), di mana legitimasi raja ditegakkan melalui ritual istana yang mewah, hirarki birokrasi yang tersentralisasi, dan kontrol atas tenaga kerja pertanian. Sebaliknya, Hitu tidak memiliki kapasitas maupun kepentingan untuk membangun aparatus negara semacam itu. Legitimasi kepemimpinan di Hitu lebih bersifat relasional, bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menjaga jalur niaga tetap terbuka, menyelesaikan sengketa di antara kelompok-kelompok soa, dan mempertahankan koneksi dengan jaringan Islam internasional yang memberikan prestise kultural. Wolters (1999, hlm. 27) menyebut kapasitas kepemimpinan semacam ini sebagai “field of force” kemampuan seorang pemimpin untuk menarik loyalitas dari aktor-aktor lain melalui kharisma, jejaring, dan sumber daya, bukan melalui paksaan struktural.

Dimensi demografis dari pembentukan Kerajaan Hitu juga tidak dapat diabaikan. Jazirah Leihiu sejak awal merupakan kawasan yang menerima gelombang migrasi dari berbagai arah dari kepulauan Seram yang merupakan wilayah asal komunitas Alifuru, dari pesisir-pesisir Jawa dan Melayu yang membawa pedagang Muslim, serta dari India dan Arab yang mendatangkan saudagar dan ulama (Leirissa, 1999, hlm. 34–36). Keragaman demografis ini tidak menghasilkan konflik identitas yang destruktif, melainkan sebuah tatanan sosial yang plural dan adaptif, di mana berbagai kelompok menemukan ruang untuk berintegrasi melalui mekanisme perkawinan, klientelisme, dan afiliasi keagamaan. Lucassen dan Lucassen (2014, hlm. 66) menyebutnya sebagai “migration infrastructure” kapasitas suatu komunitas untuk menyerap dan mengintegrasikan migran ke dalam struktur sosialnya, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas ekonomi dan politik komunitas tersebut.

Periodeisasi pembentukan Kerajaan Hitu sendiri merupakan problem historiografis yang belum sepenuhnya terpecahkan. Sumber-sumber tradisional lokal, termasuk hikayat dan tradisi lisan, menyebutkan tokoh-tokoh pendiri seperti Jamilu dan Perdana Jamilu sebagai agen-agen Islamisasi sekaligus perintis kekuasaan, namun kronologi yang pasti sulit ditetapkan tanpa verifikasi silang dengan sumber-sumber Arab, Portugis, atau Jawa (Andaya, 1993, hlm. 55). Secara arkeologis, kehadiran artefak-artefak perdagangan Tionghoa dari abad ke-13 dan ke-14 di beberapa situs di Ambon menunjukkan bahwa aktivitas niaga yang intensif telah berlangsung jauh sebelum terbentuknya struktur kerajaan yang terdokumentasi (Tjandrasasmita, 2009, hlm. 140). Hal ini memperkuat argumen bahwa Kerajaan Hitu merupakan formalisasi politik dari

jaringan sosial-ekonomi yang telah mapan, bukan penciptaan de novo oleh kelompok elite tertentu.

Implikasi dari semua dimensi tersebut terhadap pemahaman historiografi Indonesia adalah signifikan. Selama beberapa dekade, sejarah nasional Indonesia cenderung ditulis dengan menempatkan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram sebagai episentrum narasi, sementara entitas-entitas seperti Hitu didegradasi menjadi catatan kaki dalam cerita besar tentang integrasi nasional (Schulte Nordholt & van Klinken, 2007, hlm. 6). Namun, perspektif historiografi yang lebih baru yang dipengaruhi oleh gelombang “new imperial history” dan “local history turn” menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan maritim seperti Hitu justru merupakan laboratorium penting untuk memahami bagaimana masyarakat-masyarakat non-Jawa mengonstruksi dan menegosiasikan kedaulatan mereka dalam kondisi yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan besar. Pemahaman tentang Hitu, dengan demikian, adalah pemahaman tentang pluralitas pengalaman historis Indonesia itu sendiri.

2. Proses Islamisasi dan Rekonfigurasi Legitimasi Kekuasaan di Hitu

Jalur masuknya Islam ke wilayah Maluku merupakan salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan dalam historiografi Islam Nusantara. Setidaknya terdapat tiga saluran utama yang dapat diidentifikasi berdasarkan penelitian komparatif: jalur dari Jawa melalui pedagang-pedagang Muslim yang beroperasi di jaringan perdagangan Jawa-Maluku, jalur dari Melayu-Sumatera yang terhubung melalui Ternate dan Tidore, serta jalur langsung dari India (Gujarat dan Malabar) maupun dari Hadhramaut di Yaman melalui saudagar dan ulama yang berlayar di Samudra Hindia (Ricklefs, 2008, hlm. 19–21). Tjandrasasmita (2009, hlm. 143) menekankan bahwa ketiga jalur ini tidak beroperasi secara eksklusif atau berurutan, melainkan secara simultan dan saling memperkuat, sehingga Islamisasi di Maluku termasuk di Hitu memiliki karakter kosmopolitan yang tidak dapat direduksi pada satu sumber pengaruh tunggal.

Mekanisme penyebaran Islam di Hitu secara konkret berlangsung melalui beberapa prosedur sosial yang saling berkaitan. Perkawinan antara pedagang Muslim dan perempuan lokal merupakan salah satu jalur paling efektif, karena ia tidak hanya mentransfer identitas keagamaan secara biologis-genealogis, tetapi juga menciptakan ikatan kekerabatan yang mengintegrasikan keluarga-keluarga pedagang asing ke dalam struktur soa lokal (B.W. Andaya, 2006, hlm. 89). Di samping itu, kehadiran ulama yang berfungsi sebagai guru agama, hakim syariat, dan konsultan diplomatik memberikan dimensi institusional pada proses Islamisasi mereka membangun masjid, mendirikan pengajian, dan menulis manuskrip keagamaan yang memperkuat identitas Muslim komunitas lokal. Kehadiran tokoh seperti Perdana Jamilu, yang dalam tradisi Hitu digambarkan sebagai ulama sekaligus pemimpin militer, merupakan cerminan dari hibriditas peran ini.

Dari perspektif sosiologi kekuasaan, penerimaan Islam oleh elite Hitu tidak semata-mata merupakan konversi spiritual tetapi juga keputusan rasional yang memperhitungkan keuntungan ekonomi dan politik. Masuk Islam berarti masuk ke dalam komunitas kredo yang luas ummah yang memiliki jaringan perdagangan, mekanisme kredit, dan sistem arbitrase sengketa yang melampaui batas-batas etnis dan geografis. Abu-Lughod (1989, hlm. 195–197) menunjukkan bahwa pada abad ke-13 hingga ke-16, pedagang-pedagang Muslim menguasai

sebagian besar jaringan perdagangan lintas-samudra dari Mediterania hingga Maluku, sehingga afiliasi keagamaan berfungsi sekaligus sebagai identitas kultural dan kartu kredit dalam transaksi niaga internasional. Elite Hitu yang mengadopsi Islam memperoleh akses ke jaringan ini termasuk kepercayaan dari pedagang-pedagang Jawa, Melayu, dan Gujarat yang sebelumnya mungkin memandang mereka sebagai orang luar.

Integrasi antara otoritas keagamaan dan kepemimpinan politik dalam sistem Kerajaan Hitu menghasilkan model kekuasaan yang oleh Milner (1982, hlm. 44) disebut sebagai kerajaan Islam, sebuah entitas di mana raja atau pemimpin memperoleh legitimasinya bukan hanya dari garis keturunan adat, tetapi juga dari posisinya sebagai pelindung komunitas Muslim dan pelaksana syariat. Dalam konteks Hitu, gelar-gelar yang dipegang oleh pemimpin kerajaan termasuk referensi kepada kepemimpinan dalam urusan keagamaan mencerminkan fusi antara otoritas adat dan otoritas Islam yang saling memperkuat. Pola ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai dual legitimacy kemampuan pemimpin untuk mengklaim otoritas dari dua sumber berbeda sekaligus, yang menjadikannya lebih tahan terhadap tantangan dari kelompok-kelompok yang hanya dapat mengklaim salah satu sumber tersebut.

Dimensi sinkretis dari Islamisasi awal Hitu tidak boleh diabaikan dalam rekonstruksi historis yang cermat. Ricklefs (2006, hlm. 6–9) dalam kajian monumentalnya tentang “mystic synthesis” menunjukkan bahwa Islam yang pertama kali diterima oleh komunitas-komunitas pesisir di Nusantara seringkali merupakan varian sufistik yang toleran terhadap praktik-praktik lokal termasuk kepercayaan animistik, ritual leluhur, dan kosmologi tradisional yang tidak secara eksplisit bertentangan dengan monoteisme Islam. Di Hitu, jejak-jejak sinkretisme ini terlihat dalam persistensi ritual-ritual soa yang tetap dipraktikkan meskipun komunitas sudah secara formal memeluk Islam, menunjukkan bahwa konversi bukanlah pemutusan total dari sistem kepercayaan sebelumnya melainkan sebuah penambahan lapisan makna baru di atas substrat budaya yang sudah ada. Proses ini berubah secara bertahap ketika ortodoksi yang lebih ketat mulai diperkenalkan melalui kontak yang lebih intensif dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Hadhramaut dan Makkah pada abad ke-17 dan ke-18.

Implikasi yang paling signifikan dari Islamisasi Hitu berkaitan dengan fungsinya sebagai identitas resistensi terhadap ekspansi kolonial Kristen. Ketika Portugis tiba di Maluku pada awal abad ke-16 membawa agenda misionaris yang eksplisit di mana konversi ke Katolik seringkali dipaksakan melalui intimidasi militer identitas Islam Hitu segera mengkristal menjadi penanda perbedaan yang tak dapat dikompromikan (Subrahmanyam, 1993, hlm. 87). Perlawanan Hitu terhadap Portugis, terutama pada paruh pertama abad ke-16, tidak hanya bermotif ekonomi tetapi juga religius sebuah perlawanan atas nama pertahanan komunitas Muslim terhadap kekuatan Kristen yang mengancam. Dimensi religius ini memberikan kohesi ideologis kepada aliansi-aliansi resistensi yang dibentuk Hitu dengan Ternate dan komunitas-komunitas Muslim lain di Maluku, menciptakan solidaritas yang melampaui kepentingan niaga semata.

Perbandingan dengan proses Islamisasi di wilayah lain di Nusantara memperkuat pemahaman tentang kekhasan pengalaman Hitu. Di pantai utara Jawa, Islamisasi berlangsung dalam konteks urbanisasi perdagangan yang menghasilkan kota-kota pelabuhan kosmopolit seperti Demak, Tuban, dan Gresik, yang kemudian menjadi basis kekuatan politik Islam yang cukup kuat untuk menantang hegemoni Majapahit (Tjandrasasmita, 2009, hlm. 112). Di

Sulawesi Selatan, Islamisasi pada awal abad ke-17 berlangsung melalui keputusan elit kerajaan Gowa dan Tallo yang bersifat top-down dan segera diikuti oleh aparat negara dalam mengimplementasikan norma-norma keislaman. Hitu, sebaliknya, berada di antara dua model tersebut Islamisasinya berbasis perdagangan seperti di Jawa pesisir, namun kemudian mengembangkan dimensi kenegaraan seperti di Sulawesi. Keunikan ini menjadikan Hitu sebagai kasus studi yang berharga dalam memahami variasi regional dalam sejarah Islam Nusantara.

3. Ekonomi Rempah, Jaringan Perdagangan, dan Artikulasi Kekuasaan Hitu

Signifikansi global komoditas cengkeh (*Syzygium aromaticum*) dan pala (*Myristica fragrans*) dalam ekonomi pra-modern sulit dilebih-lebihkan. Pada abad ke-15 dan ke-16, harga cengkeh di pasar-pasar Eropa dapat mencapai empat puluh kali lipat harga belinya di Maluku, menjadikan perdagangan rempah sebagai salah satu transaksi niaga paling menguntungkan dalam sejarah kapitalisme awal (Pomeranz & Topik, 1999, hlm. 159). Ketidakseimbangan ini mendorong investasi besar-besaran oleh berbagai kekuatan mulai dari pedagang individual, serikat dagang kota-kota pelabuhan Asia, hingga negara-negara Eropa dalam membangun infrastruktur pelayaran dan jaringan intelijen untuk mengeksploitasi jalur perdagangan ini. Bagi Kerajaan Hitu, posisi sebagai bagian dari lingkungan produksi rempah tersebut berarti secara struktural selalu berada di persimpangan kepentingan berbagai aktor eksternal yang jauh lebih besar secara militer, namun bergantung pada kooperasi lokal untuk memastikan ketersediaan pasokan.

Struktur jaringan perdagangan rempah yang melibatkan Hitu bersifat multilateral dan tidak hirarkis dalam pengertian modern. Knaap dan Sutherland (2004, hlm. 17–20) menunjukkan bahwa pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17, pasar rempah Maluku dihadiri oleh setidaknya enam kelompok pedagang yang berbeda secara etnis dan institusional: pedagang Jawa dari Demak, Tuban, dan Gresik; pedagang Melayu dari Malaka dan kemudian Johor; pedagang Tionghoa yang beroperasi secara individual maupun melalui kongsi; saudagar Gujarat dan Malabar dari subbenua India; pedagang Arab Hadhramawi; serta sejak awal abad ke-16 pedagang Portugis yang berupaya memposisikan diri sebagai penguasa tunggal jalur tersebut. Dalam ekologi niaga yang beragam ini, Hitu mengembangkan strategi multi-partner engagement menjalin relasi dagang dengan berbagai kelompok secara simultan, sehingga tidak bergantung pada satu mitra tunggal yang dapat mengeksploitasi posisi ketergantungannya.

Peran Hitu sebagai entrepot titik transit dan redistribusi tidak identik dengan peran produsen rempah semata. Meskipun wilayah Hitu memang menghasilkan cengkeh, signifikansinya yang lebih besar terletak pada posisinya sebagai pelabuhan yang dapat menyediakan fasilitas gudang, pertukaran mata uang, penyediaan perbekalan, dan penyelesaian kontrak bagi pedagang yang singgah. Reid (1988, hlm. 93–95) mengidentifikasi ciri-ciri entrepôt Asia Tenggara klasik: populasi yang beragam, toleransi keagamaan yang pragmatis, regulasi perdagangan yang ringan, dan jaminan keamanan bagi pedagang asing. Hitu, pada masa kejayaannya, memenuhi sebagian besar kriteria ini sebuah kota pelabuhan kecil namun fungsional yang mampu menarik pedagang dari berbagai penjuru karena reputasinya sebagai tempat yang aman dan menguntungkan untuk bertransaksi.

Hubungan Hitu dengan dua kekuatan besar di Maluku Utara, Ternate dan Tidore merupakan dimensi penting yang sering kurang mendapat perhatian dalam kajian tentang Hitu secara terisolasi. Ternate dan Tidore secara historis bersaing untuk memperoleh hegemoni atas jaringan perdagangan di Maluku, dan Hitu seringkali menjadi objek perebutan pengaruh di antara keduanya (Andaya, 1993, hlm. 102–105). Namun pada saat yang sama, Hitu mampu memanfaatkan rivalitas Ternate-Tidore sebagai ruang untuk mempertahankan otonominya dengan bersandar pada salah satu pihak manakala tekanan dari pihak lain atau dari kekuatan kolonial menjadi berlebihan. Strategi balancing semacam ini merupakan praktik umum dalam geopolitik kerajaan-kerajaan kecil yang beroperasi di antara kekuatan-kekuatan yang lebih besar, dan menunjukkan kapasitas diplomatik elite Hitu yang tidak boleh diremehkan.

Dampak kemakmuran niaga terhadap struktur sosial internal Hitu juga patut dianalisis. Masuknya surplus dari perdagangan rempah memungkinkan elite soa untuk mengakumulasi kekayaan dalam bentuk yang dapat diinvestasikan ke dalam jaringan klientelisme membiayai pesta adat, memberikan pinjaman kepada anggota soa yang lebih miskin, dan mendanai ekspedisi perdagangan yang membawa kembali keuntungan. Pola akumulasi ini menciptakan diferensiasi sosial yang semakin tajam di dalam komunitas Hitu, di mana perbedaan antara orang kaya dan orang biasa mulai melampaui perbedaan status adat yang berbasis genealogi (Cooley, 1962, hlm. 54–56). Wolters (1999, hlm. 31) menyebut fenomena ini sebagai commercial stratification proses di mana kesuksesan niaga menghasilkan hierarki sosial baru yang tidak sepenuhnya terikat pada tatanan adat yang lama, namun juga belum cukup kuat untuk menggantikannya secara tuntas.

Partisipasi pedagang asing dalam kehidupan sosial Hitu membawa implikasi kultural yang melampaui sekadar transaksi ekonomi. Komunitas-komunitas diaspora saudagar Jawa yang menetap, keluarga Gujarat yang beranak-pinak di Hitu, ulama Arab yang mengajar dan menikah dengan perempuan lokal memperkaya repertoar budaya komunitas Hitu dengan berbagai pengetahuan, praktik, dan artefak baru. Teknologi pembuatan kapal, teknik navigasi, sistem penulisan aksara Jawi, praktik kuliner, dan genre-genre sastra tertentu kemungkinan besar masuk ke Hitu melalui jalur-jalur pertukaran kultural yang menyertai arus niaga ini. Hall (2011, hlm. 211) menekankan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara bukan hanya tempat bertukarnya barang, tetapi juga arena pertukaran pengetahuan dan modal kultural yang membentuk apa yang ia sebut sebagai port city civilization.

Krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh intervensi kolonial Eropa khususnya kebijakan monopoli VOC harus dipahami sebagai gangguan struktural yang fundamental terhadap logika ekonomi yang telah memungkinkan keberadaan Kerajaan Hitu selama berabad-abad. Ketika VOC memaksakan hongi tochten ekspedisi militer yang menghancurkan pohon-pohon cengkeh di wilayah di luar kendali langsung mereka mereka secara efektif memusnahkan basis material dari kemakmuran Hitu (Knaap, 1992, hlm. 46–47). Produksi yang dipaksa turun, harga yang ditekan jauh di bawah harga pasar, dan larangan berdagang dengan pedagang non-VOC menutup seluruh diversifikasi mitra dagang yang selama ini menjadi tulang punggung strategi ketahanan ekonomi Hitu. Dampaknya tidak hanya ekonomis tetapi juga politis pemimpin yang kehilangan kemampuan redistribusi kehilangan basis klientelisme yang menjadi fondasi otoritasnya.

4. Sistem Soa, Oligarki Federatif, dan Manajemen Konflik Internal

Sistem soa sebagai unit organisasi sosial dasar dalam masyarakat Ambon-Maluku merupakan salah satu institusi adat yang paling persisten dan paling berpengaruh dalam sejarah kawasan tersebut. Secara struktural, soa merupakan kelompok kerabat yang dipersatukan oleh klaim atas garis keturunan patrilineal bersama meskipun dalam praktiknya, inkorporasi individu dari luar melalui adopsi, perkawinan, atau ikatan klientelisme membuat batas-batas soa tidak sepenuhnya kaku (Cooley, 1962, hlm. 18–22). Setiap soa memiliki kepala (kepala soa) yang bertindak sebagai representatif dalam musyawarah kolektif, sebagai pengelola hak adat atas tanah dan sumber daya, serta sebagai pemimpin ritual dalam upacara-upacara yang mendefinisikan identitas kelompok. Dalam konteks Kerajaan Hitu, konfigurasi soa-soa utama yang masing-masing diwakili oleh seorang perdana atau raja patih membentuk semacam dewan aristokrat yang kekuasaannya bersifat kolektif dan tidak dapat direduksi pada otoritas seorang raja tunggal.

Distribusi kekuasaan di antara empat perdana utama Hitu yang mewakili soa-soa terkemuka di jazirah Leihitu menciptakan apa yang dalam ilmu politik komparatif dapat dikategorikan sebagai oligarki federatif. Vickers (2013, hlm. 44) dan Weatherbee (2009, hlm. 32) secara terpisah menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan semacam ini lazim dijumpai pada masyarakat-masyarakat maritim di Asia Tenggara yang tidak memiliki sumber daya untuk mendanai aparatus negara terpusat yang besar. Oligarki federatif bergantung pada konsensus di antara para elite sebagai mekanisme pengambilan keputusan, yang di satu pihak membuatnya lebih inklusif dan representatif daripada monarki absolut, namun di lain pihak membuatnya lebih lambat dalam merespons krisis dan lebih rentan terhadap perpecahan ketika kepentingan anggota oligarki mulai berdivergensi. Karakteristik ini memiliki implikasi penting untuk memahami mengapa Hitu kadang-kadang gagal dalam membangun respons yang kohesif terhadap tantangan-tantangan eksternal.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Kerajaan Hitu yang didasarkan pada musyawarah antar soa mencerminkan etika politik yang memprioritaskan konsensus atas efisiensi. Patut dicatat bahwa tradisi musyawarah ini bukan unik bagi Hitu, melainkan merupakan bagian dari pola yang lebih luas yang oleh Gibson dan Sillander (2011, hlm. 7–10) diidentifikasi sebagai egalitarian ethos dalam masyarakat-masyarakat Austronesia sebuah kecenderungan kultural yang menolak konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada individu tunggal dan menekankan kewajiban pemimpin untuk berkonsultasi dengan kelompok-kelompok yang terkena dampak keputusannya. Dalam praktiknya, musyawarah soa di Hitu tidak sekadar formalitas seremonial tetapi merupakan arena negosiasi substantif di mana berbagai kepentingan ekonomi, religius, genealogis dipertaruhkan dan dinegosiasikan sebelum keputusan dapat diimplementasikan dengan legitimasi yang memadai.

Potensi konflik yang inheren dalam sistem soa menjadi nyata manakala kondisi-kondisi yang biasanya meredam ketegangan surplus ekonomi yang cukup untuk dibagi, ancaman eksternal yang cukup besar untuk memaksa solidaritas, dan kepemimpinan yang cukup karismatik untuk menjadi titik temu mulai melemah. Sejarah Hitu menunjukkan beberapa episode di mana persaingan antar soa mempengaruhi kemampuan kerajaan untuk bertindak sebagai unit politik yang kohesif. Andaya (1993, hlm. 127–129) mendokumentasikan bagaimana

pada periode tertentu, fraksi-fraksi berbeda di dalam Hitu mengambil posisi yang berlawanan terhadap kekuatan kolonial sebagian memilih kolaborasi pragmatis sementara sebagian lain memilih konfrontasi sehingga melemahkan efektivitas resistensi secara keseluruhan. Fragmentasi semacam ini bukan merupakan kelemahan kultural atau moral, melainkan konsekuensi struktural dari sebuah sistem yang didesain untuk distribusi kekuasaan, bukan untuk mobilisasi militer terpusat.

Dimensi gender dalam sistem soa Hitu juga patut mendapat perhatian yang lebih serius daripada yang biasanya diberikan oleh historiografi konvensional. B.W. Andaya (2006, hlm. 37–42) menunjukkan bahwa dalam banyak masyarakat maritim Asia Tenggara, perempuan memainkan peran ekonomi dan sosial yang signifikan sebagai pedagang, pengelola rumah tangga niaga, dan penghubung dalam aliansi-aliansi kekerabatan meskipun peran ini jarang tercatat dalam sumber-sumber tertulis yang didominasi oleh perspektif laki-laki. Dalam konteks soa Hitu, perempuan dari keluarga-keluarga perdana memiliki nilai kultural yang tinggi sebagai objek pertukaran dalam aliansi perkawinan yang menghubungkan soa-soa yang berbeda, dan identitas mereka sebagai penghubung genealogis menjadi penting dalam menentukan klaim-klaim keturunan yang mendasari legitimasi kekuasaan.

Eksplorasi perpecahan internal oleh kekuatan-kekuatan asing merupakan pola yang berulang dalam sejarah kolonial di seluruh dunia, dan Hitu tidak terkecuali dari pola ini. Widjojo (2009, hlm. 102–104) menunjukkan bagaimana VOC secara sistematis mengidentifikasi dan mengeksploitasi ketegangan antara fraksi-fraksi lokal di Maluku sebagai instrumen untuk melemahkan resistensi sebuah praktik yang dalam terminologi kolonial disebut sebagai *divide and rule* namun yang dalam kenyataannya lebih canggih dari itu, karena melibatkan manipulasi sistem kekerabatan, klaim-klaim adat, dan hierarki sosial yang sudah ada sebelumnya. Kemampuan VOC untuk mengidentifikasi dan memainkan rivalitas antar soa di Hitu merupakan bukti bahwa badan usaha asing itu memiliki intelijen lokal yang cukup memadai diperoleh melalui jaringan informan, penerjemah, dan sekutu-sekutu lokal yang bergantung pada patronase kolonial.

Relevansi sistem soa sebagai institusi bertahan melampaui periode kolonial dan terus mewarnai dinamika sosial di Ambon hingga abad ke-21. Bartels (1977, hlm. 6–8) dan kemudian Brauchler (2009, hlm. 304–307) menunjukkan bahwa identitas soa tetap menjadi rujukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Ambon meskipun telah mengalami berbagai tekanan kolonialisme, Christianisasi, modernisasi, dan konflik komunal pasca-Reformasi. Persistensi ini menunjukkan bahwa sistem soa memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa ia mampu menyesuaikan fungsinya dengan kondisi yang berubah tanpa kehilangan relevansi sosialnya. Dalam kerangka analitik yang lebih luas, hal ini menegaskan bahwa institusi-institusi adat yang tampaknya tradisional bukanlah relik pasif dari masa lalu, melainkan sistem-sistem yang terus dinegosiasikan dan diadaptasi oleh komunitas-komunitas yang mewarisinya.

5. Tekanan Kolonial, Monopoli Rempah, dan Negosiasi Ketahanan Hitu

Kedatangan armada Portugis ke perairan Maluku pada tahun 1512 di bawah komando Francisco Serrão dan kemudian Afonso de Albuquerque menandai awal dari babak baru dalam sejarah Hitu yang secara kualitatif berbeda dari semua tekanan eksternal sebelumnya. Berbeda

dengan pedagang-pedagang asing yang datang dengan orientasi niaga semata, Portugis datang dengan kombinasi tiga agenda yang saling menguatkan: dominasi perdagangan rempah, penyebaran agama Kristen Katolik, dan pembangunan jaringan benteng militer yang memungkinkan pemaksaan kedua agenda sebelumnya (Subrahmanyam, 1993, hlm. 82–85). Kombinasi ini menciptakan tantangan eksistensial bagi Hitu yang tidak pernah dihadapinya sebelumnya bukan sekadar persaingan niaga atau konflik teritorial yang dapat diselesaikan melalui negosiasi dan kompensasi, melainkan ancaman terhadap identitas religius dan sistem kekuasaan lokal itu sendiri.

Relasi awal antara Hitu dan Portugis bersifat ambigu dan tidak dapat dikategorikan secara sederhana sebagai perlawanan atau kolaborasi. Pada fase pertama kontak, sebagian elite Hitu mencoba memosisikan Portugis sebagai mitra dagang baru yang dapat diintegrasikan ke dalam jaringan multilateral yang sudah ada sebuah strategi yang selama ini berhasil dengan pedagang-pedagang asing lainnya. Namun segera menjadi jelas bahwa Portugis tidak bersedia diperlakukan sebagai salah satu dari banyak mitra, melainkan menuntut status monopoli yang tidak dapat dikompromikan (Andaya, 1993, hlm. 133–135). Ketika tuntutan ini bertabrakan dengan kepentingan pedagang-pedagang Muslim yang merupakan mitra utama elite Hitu dan dengan identitas Islam komunitas Hitu, konflik bersenjata menjadi tak terhindarkan. Perlawanan Hitu terhadap Portugis pada paruh pertama abad ke-16, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Hasan dan kemudian Teuku Hasan, merupakan salah satu episode resistensi lokal yang paling konsisten dan berkesinambungan di seluruh wilayah Maluku pada periode tersebut.

Transisi dari dominasi Portugis ke dominasi VOC yang berlangsung antara tahun 1605 dan 1621 membawa perubahan yang lebih mendasar dalam karakter intervensi asing di Maluku. Secara sekilas, pergantian ini dapat tampak sebagai pergeseran dari satu kekuatan kolonial ke kekuatan kolonial lain. Namun dalam kenyataannya, VOC mengoperasikan logika imperialisme yang secara kualitatif berbeda dari Estado da India Portugis. Di mana Portugis mengutamakan kontrol atas jalur perdagangan dan penyebaran agama, VOC mengoperasikan apa yang oleh Blussé (1986, hlm. 18) disebut sebagai corporate imperialism ekspansi yang didorong oleh kepentingan pemegang saham dan dikalkulasikan berdasarkan logika profitabilitas jangka panjang. Implikasinya adalah bahwa VOC jauh lebih sistematis, lebih efisien secara administratif, dan lebih bersedia menggunakan kekerasan ekstrim ketika keuntungan finansialnya menuntut demikian.

Kebijakan extirpatie penghancuran fisik pohon-pohon cengkeh di luar wilayah yang dikontrol langsung oleh VOC merupakan instrumen kekerasan ekonomi yang paling destruktif yang pernah diterapkan terhadap Hitu. Knaap (1992, hlm. 46–49) mendokumentasikan bagaimana ekspedisi hongi yang dilakukan secara regular dipimpin oleh pejabat VOC dengan armada perahu-perahu kora-kora dari Ternate dan sekutunya tidak hanya menghancurkan pohon tetapi juga membakar pemukiman, membunuh atau memperbudak penduduk yang dianggap melanggar aturan monopoli, dan meneror komunitas-komunitas yang mencoba menjual rempah kepada pedagang non-VOC. Dampak demografis dari kebijakan ini terhadap jazirah Leihitu sangat signifikan beberapa peneliti memperkirakan penurunan populasi yang dramatis di wilayah Maluku secara keseluruhan selama abad ke-17 akibat kombinasi kekerasan langsung, kelaparan, dan penyakit (Ricklefs, 2008, hlm. 32). Bagi Kerajaan Hitu, kehilangan

populasi berarti kehilangan tenaga produktif, kekuatan militer, dan basis pajak yang menjadi fondasi ekonomi kerajaan.

Di tengah tekanan yang semakin berat, elite Hitu mengembangkan berbagai strategi adaptasi yang mencerminkan pragmatisme politik yang cerdas meskipun seringkali memilikun secara moral. Sebagian pemimpin memilih jalur kolaborasi taktis menerima posisi sebagai kepala adat yang diakui VOC, bersedia memimpin ekspedisi hongi atas nama VOC, dan mengintegrasikan diri ke dalam hierarki patronase kolonial sebagai harga yang harus dibayar untuk mempertahankan posisi sosial dan melindungi anggota komunitas dari kekerasan yang lebih parah (Ricklefs, 2008, hlm. 33–35). Sebagian lain memilih resistensi yang lebih tersembunyi menyembunyikan pohon cengkeh dari inspeksi VOC, menyelundupkan rempah kepada pedagang non-VOC melalui jaringan bawah tanah, atau bermigrasi ke wilayah di luar jangkauan efektif kekuasaan VOC. Kedua strategi ini, meskipun tampak bertentangan, sebenarnya merupakan ekspresi dari satu keinginan yang sama, mempertahankan komunitas dan identitas dalam kondisi yang tidak memungkinkan konfrontasi terbuka.

Perlawanan bersenjata yang paling terorganisasi dari Hitu terhadap VOC yang berlangsung pada beberapa fase sepanjang abad ke-17 mengungkapkan baik kekuatan maupun keterbatasan kapasitas militer kerajaan tersebut. Aliansi yang dibangun Hitu dengan Ternate, Makassar, dan beberapa komunitas Muslim lain di Maluku menunjukkan bahwa Hitu mampu memobilisasi solidaritas regional yang cukup luas (Andaya, 1993, hlm. 174–178). Namun pada akhirnya, superioritas teknologi militer VOC khususnya artileri berat dan kemampuan logistik yang ditopang oleh modal korporat yang jauh melebihi sumber daya kerajaan-kerajaan lokal menjadikan setiap perlawanan bersenjata terbuka sebagai perjuangan yang asimetris secara fundamental. Kekalahan militer Hitu bukan merupakan bukti inferioritas kultural atau ketidakberanian, melainkan konsekuensi dari kesenjangan material yang tidak dapat dijumpat oleh keberanian atau kecerdikan taktis semata.

Sistem indirect rule yang diimplementasikan VOC pasca-penundukan mengubah secara mendasar karakter kekuasaan lokal di Hitu. Pemimpin-pemimpin adat yang sebelumnya memperoleh legitimasinya dari musyawarah soa dan dari peran mereka sebagai penghubung jaringan niaga, kini menjadi birokrat bawahan yang otoritasnya bergantung pada pengakuan VOC (van den Berg, sebagaimana dikutip dalam Andaya, 1993, hlm. 171). Transformasi ini menciptakan apa yang oleh Mamdani (1996, hlm. 22) dalam konteks Afrika kolonial disebut sebagai decentralized despotism sistem di mana penguasa lokal mempertahankan fasad kekuasaan tradisional namun substansinya telah dikosongkan oleh ketergantungan pada legitimasi dan perlindungan dari kekuatan kolonial. Dalam kondisi semacam ini, pemimpin adat Hitu menemukan dirinya dalam dilema yang tak terselesaikan: terlalu patuh terhadap VOC berarti kehilangan legitimasi di mata komunitasnya sendiri, sementara terlalu mandiri berarti mengundang intervensi militer yang destruktif.

6. Adaptabilitas Institusional, Memori Kolektif, dan Warisan Historis Kerajaan Hitu

Konsep *resiliensi institusional* yang menjadi kunci untuk memahami keberlangsungan Kerajaan Hitu di tengah tekanan yang bertubi-tubi memerlukan elaborasi teoretis yang cermat sebelum dapat diterapkan secara analitik. Dalam kajian historis-komparatif, Lieberman (2003,

hlm. 33–36) memperkenalkan *kerangkaprotected rimland* suatu kondisi di mana kerajaan-kerajaan yang terletak di pinggiran jaringan kekuasaan besar seringkali justru mampu mempertahankan kontinuitas identitas politiknya karena berada di luar jangkauan efektif invasi yang benar-benar totalitas. Hitu, dalam pembacaan ini, berada dalam posisi yang secara paradoks menguntungkan: cukup bernilai ekonomi untuk menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar, namun cukup terpencil secara geografis untuk menghindari penundukan yang tuntas dan menyeluruh. Ruang ambiguitas ini menjadi celah di mana kapasitas adaptasi Hitu dapat beroperasi.

Adaptabilitas Kerajaan Hitu tidak dapat dipahami sebagai kemampuan untuk berubah tanpa kehilangan identitas yang dalam terminologi sosiologis disebut sebagai *morphostasis* melainkan sebagai kemampuan untuk mempertahankan inti dari identitas kolektif (kepercayaan Islam, sistem soa, memori genealogi) sembari terus-menerus menyesuaikan struktur dan fungsi institusinya dengan kondisi yang berubah. North (1990, hlm. 6) membedakan antara *formal institutions* aturan-aturan tertulis dan hierarki kekuasaan formal dan *informal institutions* norma-norma kultural, kepercayaan bersama, dan konvensi sosial yang beroperasi di luar penulisan dan pemaksaan hukum. Ketika VOC menghancurkan institusi formal Kerajaan Hitu melalui penundukan militer dan rekonfigurasi hierarki politik, institusi-institusi informal sistem soa, jaringan kekerabatan, praktik-praktik keagamaan komunal tetap bertahan dan menjadi wadah bagi kontinuitas identitas.

Memori kolektif sebagai basis resistensi kultural merupakan dimensi yang sering terabaikan dalam sejarah politik namun sangat penting untuk memahami persistensi identitas Hitu. Connerton (1989, hlm. 3–5) menunjukkan bahwa memori kolektif tidak tersimpan semata-mata dalam teks dan arsip, melainkan dalam tubuh, ritual, dan praktik-praktik komunal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Hitu, tradisi lisan tentang leluhur pendiri, ritual-ritual soa yang merayakan genealogi bersama, dan narasi-narasi tentang perlawanan terhadap Portugis dan VOC berfungsi sebagai *mnemonic community* sistem memori komunal yang terus mereproduksi identitas Hitu bahkan ketika struktur politiknya telah sangat berubah. Widjojo (2009, hlm. 14–16) menunjukkan bahwa memori-memori semacam ini kemudian dimobilisasi kembali dalam berbagai gerakan resistensi di Maluku pada abad-abad berikutnya, menunjukkan bahwa warisan Kerajaan Hitu bukanlah sesuatu yang beku dalam sejarah tetapi sesuatu yang terus hidup dan beresonansi dalam kesadaran komunal.

Perbandingan antara Hitu dengan kerajaan-kerajaan lain di Maluku yang mengalami nasib yang berbeda khususnya Banda yang penduduknya hampir musnah akibat genosida VOC pada 1621 mempertegas signifikansi dari strategi adaptasi yang ditempuh Hitu. Pembantaian Banda oleh Jan Pieterszoon Coen memusnahkan hampir seluruh populasi asli kepulauan tersebut dalam waktu singkat, sebuah tragedi yang oleh Hanna (1978, hlm. 55) digambarkan sebagai salah satu genosida paling sistematis dalam sejarah kolonial Asia. Hitu, yang juga mengalami tekanan VOC yang sangat berat, berhasil menghindari nasib serupa sebagian karena nilai strategis pelabuhan dan jaringan informasinya bagi VOC, sebagian karena kemampuan diplomatik elitnya, dan sebagian karena geografi jazirah Leihitu yang lebih mudah memungkinkan pelarian dan penyembunyian populasi. Keberhasilan Hitu dalam bertahan,

dengan demikian, bukan semata-mata hasil dari kehendak bebas melainkan juga dari kombinasi keberuntungan geografis dan kecakapan situasional.

Warisan Kerajaan Hitu dalam konteks pasca-kolonial dan pasca-kemerdekaan Indonesia mengungkapkan bagaimana identitas historis dapat menjadi sumber daya kultural dalam negosiasi posisi komunal dalam struktur nasional yang baru. Schulte Nordholt dan van Klinken (2007, hlm. 12–15) menunjukkan bahwa dalam konteks desentralisasi pasca-Reformasi, komunitas-komunitas di Indonesia cenderung memobilisasi narasi historis tentang leluhur, kerajaan, dan hak-hak adat sebagai dasar klaim atas sumber daya, otonomi, dan pengakuan politik. Di Maluku, termasuk di komunitas-komunitas yang mewarisi identitas Hitu, kebangkitan kesadaran tentang sejarah kerajaan beriringan dengan kebangkitan identitas adat yang digunakan dalam negosiasi dengan pemerintah daerah dan nasional. Proses ini menunjukkan bahwa sejarah Kerajaan Hitu bukanlah urusan arkeologi intelektual yang murni akademis, melainkan reservoir makna yang terus relevan dalam konteks kontemporer.

Dari perspektif metodologis, kajian atas Kerajaan Hitu juga memberi implikasi penting bagi cara kita menulis sejarah Indonesia secara lebih luas. Historiografi Indonesia pasca-kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk membangun narasi kohesif tentang bangsa sebuah kebutuhan yang hampir tak terhindarkan mendorong simplifikasi dan sentralisasi naratif. Hasilnya adalah kecenderungan untuk membaca sejarah nusantara melalui lensa Jawa-sentris atau melalui lensa teleologi nasionalisme yang memproyeksikan kesatuan Indonesia ke masa lalu. Ricklefs (2008, hlm. 3) mengkritik kecenderungan ini dengan menekankan perlunya membangun pemahaman yang lebih nuansif tentang keragaman pengalaman historis berbagai komunitas di kepulauan Indonesia. Kajian tentang Hitu, dengan segala kompleksitasnya perpaduan Islam, adat, niaga, dan resistensi kolonial merupakan kontribusi langsung terhadap proyek revisionisme historiografis yang diperlukan tersebut.

Relevansi akademik dari studi Kerajaan Hitu melampaui batas disiplin sejarah dan menjangkau bidang-bidang seperti studi warisan budaya (*heritage studies*), kajian maritim, dan bahkan pendidikan sejarah. Dalam konteks *heritage studies*, situs-situs yang berkaitan dengan Kerajaan Hitu termasuk bekas-bekas benteng, masjid tua, dan lanskap budaya jazirah Leihitu merupakan warisan yang menghubungkan komunitas kontemporer dengan identitas historis mereka. Smith (2006, hlm. 11) menekankan bahwa warisan budaya tidak sekadar berupa benda-benda fisik tetapi juga melibatkan proses-proses pemaknaan yang komunitas-komunitas lakukan terhadap masa lalu mereka. Dalam kerangka ini, Kerajaan Hitu bukan hanya objek penelitian historis tetapi juga subjek pemaknaan kultural yang terus diaktivasi oleh komunitas-komunitas yang mewarisi sejarahnya, sebuah karakteristik yang menjadikannya relevan tidak hanya sebagai materi akademis tetapi juga sebagai sumber daya pedagogis dalam pendidikan sejarah.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa eksistensi Kerajaan Hitu (1600-1945) melampaui narasi sejarah lokal konvensional dan harus diposisikan sebagai aktor sentral dalam dinamika globalisasi arkaik di Asia Tenggara. Secara analitis, penelitian ini membuktikan bahwa Hitu

bukan sekedar objek pasif dari ekspansi kolonial Barat, melainkan arsitek jaringan perdagangan lintas budaya yang telah mengoperasikan mekanisme pasar global secara mandiri jauh sebelum hegemoni VOC mapan. Meskipun keterbukaan kosmopolitannya menimbulkan kerentanan terhadap kapitalisme monopolistik Eropa, Hitu menunjukkan resiliensi yang luar biasa melalui dikotomi antara kehilangan bentuk politik formal dan perlindungan substansi identitas. Melalui keinginan institusi adat seperti sistem soa, Hitu mampu melakukan transformasi dari entitas politik berdaulat menjadi kekuatan kultural informal yang terus dinegosiasikan hingga era kontemporer. Pada akhirnya, studi ini menawarkan kontribusi signifikan bagi dekolonisasi historiografi Indonesia dengan menunjukkan bahwa ketahanan suatu komunitas tidak terletak pada kekakuan tradisi, melainkan pada kemampuan melakukan hibridisasi kreatif dalam merespons arus perubahan global yang asimetris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Lughod, JL (1989). *Sebelum hegemoni Eropa: Sistem dunia tahun 1250–1350 M*. Oxford University Press.
- Andaya, BW (2006). *Rahim yang Berkobar: Memposisikan Kembali Perempuan di Asia Tenggara pada Awal Zaman Modern*. University of Hawai'i Press.
- Andaya, LY (1993). *Dunia Maluku: Indonesia Timur pada periode modern awal*. University of Hawai'i Press.
- Bartels, D. (1977). *Menjaga gunung yang tak terlihat: Aliansi antar desa, sinkretisme agama, dan identitas etnis di antara umat Kristen dan Muslim Ambon di Maluku* (Disertasi doctoral, Universitas Cornell).
- Blussé, L. (1986). *Perusahaan yang aneh: pemukim Tionghoa, wanita mestizo, dan orang Belanda di VOC Batavia*. Foris Publications.
- Brauchler, B. (2009). *Bagaimana masa lalu dapat memengaruhi masa depan: Maluku dan peran media*. Dalam B. Brauchler (Ed.), *Mendamaikan Indonesia: Peran akar rumput untuk perdamaian*. Routledge.
- Connerton, P. (1989). *Bagaimana masyarakat mengingat*. Cambridge University Press.
- Cooley, FL (1962). *Adat Ambon: Deskripsi umum*. Studi Asia Tenggara Universitas Yale.
- Geertz, C. (1980). *Negara: Negara teater di Bali abad kesembilan belas*. Princeton University Press.

- Gibson, T., & Sillander, K. (Eds.). (2011). *Solidaritas anarkis: Otonomi, kesetaraan, dan persaudaraan di Asia Tenggara*. Studi Asia Tenggara Universitas Yale.
- Hall, KR (2011). *Sejarah awal Asia Tenggara: Perdagangan maritim dan perkembangan masyarakat, 100–1500*. Rowman & Littlefield.
- Hanna, WA (1978). *Banda Indonesia: Kolonialisme dan dampaknya di Kepulauan Pala*. Institut untuk Studi Isu-isu Manusia.
- Knaap, G. (1992). *Kruidnagelen en christenen: De Vereenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656–1696*. Pers KITLV.
- Knaap, G., & Sutherland, H. (2004). *Pedagang musim hujan: Kapal, nakhoda, dan komoditas di Makassar abad ke-18*. KITLV Press.
- Kuntowijoyo, K. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wakana
- Leirissa, RZ (1999). *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*. Balai Pustaka.
- Lieberman, V. (2003). *Paralel yang aneh: Asia Tenggara dalam konteks global, sekitar tahun 800–1830 (Vol. 1)*. Cambridge University Press.
- Lucassen, J., & Lucassen, L. (2014). Mengukur dan mengkuantifikasi migrasi lintas budaya dalam sejarah pra-modern. *European Review of History*, 21 (3), 63–79. <https://doi.org/10.1080/13507486.2014.898758>
- Mamdani, M. (1996). *Warga negara dan subjek: Afrika kontemporer dan warisan kolonialisme akhir*. Princeton University Press.
- Manasama, JZ. (1977). *Hikayat Tanah Hitu: Sumber Sejarah dari Maluku*. Universitas Rijks Leiden.
- Milner, AC (1982). *Kerajaan: Budaya politik Melayu pada malam pemerintahan kolonial*. University of Arizona Press.
- North, DC (1990). *Institusi, perubahan institusional, dan kinerja ekonomi*. Cambridge University Press.

- Pomeranz, K., & Topik, S. (1999). *Dunia yang diciptakan oleh perdagangan: Masyarakat, budaya, dan ekonomi dunia, 1400 hingga sekarang*. ME Sharpe.
- Reid, A. (1988). *Asia Tenggara pada zaman perdagangan, 1450–1680: Vol. 1. Negeri-negeri di bawah angin*. Yale University Press.
- Reid, A. (1993). *Asia Tenggara di era perdagangan, 1450–1680: Vol. 2. Ekspansi dan krisis*. Yale University Press.
- Ricklefs, MC (2006). *Sintesis mistik di Jawa: Sejarah Islamisasi dari abad keempat belas hingga awal abad kesembilan belas*. EastBridge.
- Ricklefs, MC (2008). *Sejarah Indonesia modern sejak sekitar tahun 1200 (edisi ke-4)*. Stanford University Press.
- Schulte Nordholt, H., & van Klinken, G. (Eds.). (2007). *Negosiasi ulang batas-batas: Politik lokal di Indonesia pasca-Suharto*. KITLV Press.
- Smith, L. (2006). *Penggunaan warisan*. Routledge.
- Subrahmanyam, S. (1993). *Kekaisaran Portugis di Asia, 1500–1700: Sejarah politik dan ekonomi*. Longman.
- Tjandrasasmita, U. (2009). *Arkeologi Islam Nusantara*. KPG.
- Vickers, A. (2013). *Sejarah Indonesia modern (edisi ke-2)*. Cambridge University Press.
- Weatherbee, DE (2009). *Hubungan internasional di Asia Tenggara: Perjuangan untuk otonomi (edisi ke-2)*. Rowman & Littlefield.
- Widjojo, M. (2009). *Pemberontakan Pangeran Nuku: Pembentukan aliansi lintas budaya di Maluku, c. 1780–1810*. cemerlang.
- Wolters, OW (1999). *Sejarah, budaya, dan kawasan dalam perspektif Asia Tenggara (Edisi revisi)*. Program Asia Tenggara Universitas Cornell.